

Amicus Curiae: in the 2024 PPHU Presidential Election Session

Dion Untung Wijaya^{1*}, Agustinus Manurung², Yogi Angistya Tamara³, Mijan⁴,
Thariq Muslim⁵, Hj. Imas Rosidawati Wiradirja⁶

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Dion Untung Wijaya dionuntungwijaya@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Amicus Curiae,
General Election Results
Dispute, 2024 Presidential
Election, Constitutional Court,
Legal Process Justice,
Qualitative Approach

Received : 4 April

Revised : 17 May

Accepted: 19 June

©2024 Wijaya, Manurung, Tamara,
Mijan, Muslim, Wiradirja: This is an
open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research examines the role of the amicus curiae in the 2024 Presidential Election Results Dispute (PPHU) trial in Indonesia. Through a qualitative approach, this research analyzes the contribution of the amicus curiae's independent views to the final decision of the Constitutional Court (MK) and public trust in the fairness of the legal process. Data was collected through document analysis, interviews and direct observation of the trial process. The findings show that amicus curiae has an important role in bringing a neutral and in-depth legal perspective, enriching legal discussions in the courtroom, and strengthening the legitimacy of the Constitutional Court's decisions in the eyes of the public. Despite being faced with various challenges, including political pressure and the complexity of legal cases, the amicus curiae remains consistent in maintaining its legal neutrality and independence

Amicus Curiae: dalam Sidang PHPU Pilpres 2024

Dion Untung Wijaya^{1*}, Agustinus Manurung², Yogi Angistya Tamara³, Mijan⁴, Thariq Muslim⁵, Hj. Imas Rosidawati Wiradirja⁶

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Dion Untung Wijaya dionuntungwijaya@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Amicus Curiae, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi, Keadilan Proses Hukum, Pendekatan Kualitatif

Received : 4 April

Revised : 17 May

Accepted: 19 June

©2024 Wijaya, Manurung, Tamara, Mijan, Muslim, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran amicus curiae dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis kontribusi pandangan independen amicus curiae terhadap keputusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK) dan kepercayaan publik terhadap keadilan proses hukum. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi langsung terhadap proses sidang. Temuan menunjukkan bahwa amicus curiae memiliki peran penting dalam membawa perspektif hukum yang netral dan mendalam, memperkaya diskusi hukum di ruang sidang, serta memperkuat legitimasi keputusan MK di mata publik. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk tekanan politik dan kompleksitas kasus hukum, amicus curiae tetap konsisten dalam menjaga netralitas hukum dan independensinya

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, Indonesia merayakan pesta demokrasi dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) yang sangat dinanti-nantikan. Namun, euforia ini disertai dengan sejumlah kontroversi dan tantangan hukum yang memunculkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menjadi sorotan publik. Dalam sidang PHPU Pilpres 2024, peran *amicus curiae*, atau teman pengadilan, muncul sebagai elemen penting yang memberikan pandangan independen kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait isu-isu hukum yang dihadapi dalam proses persidangan.

Pertama-tama, latar belakang politik yang rumit dalam Pilpres 2024 menjadi landasan bagi tim *amicus curiae* dalam mengambil peran mereka. Persaingan politik yang ketat, polarisasi masyarakat, serta klaim-klaim kecurangan yang tersebar luas di media sosial menjadi konteks yang harus diperhatikan. Dalam suasana seperti ini, *amicus curiae* bertindak sebagai penyampai pengetahuan hukum yang netral dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang panas.

Selain itu, kerangka hukum yang menjadi pijakan dalam sidang PHPU juga mempengaruhi peran *amicus curiae*. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait menjadi pedoman bagi MK dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, *amicus curiae* harus memahami secara mendalam aspek-aspek konstitusional dan hukum yang menjadi pokok persidangan agar dapat memberikan pandangan yang bermakna kepada MK.

Dalam konteks ini pula, pentingnya keberadaan *amicus curiae* sebagai pihak yang memberikan pandangan independen tidak bisa dilebih-lebihkan. Mereka membantu MK dalam memahami implikasi keputusan yang akan diambil terhadap prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, peran *amicus curiae* tidak hanya memengaruhi hasil akhir sidang PHPU, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas proses hukum di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Amicus Curiae

Amicus Curiae (teman pengadilan) adalah pihak yang memberikan pandangan independen kepada pengadilan dalam proses hukum tertentu, meskipun tidak memiliki status sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perselisihan tersebut. Dalam konteks sidang PHPU Pilpres 2024, *amicus curiae* memiliki peran penting sebagai penasihat hukum independen bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka membantu MK dengan menyediakan pandangan hukum yang netral dan mendalam terkait isu-isu yang menjadi pokok persidangan, seperti konstitusionalitas aturan, prosedur pemilihan, dan implikasi keputusan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dengan memberikan perspektif yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak yang terlibat langsung, *amicus curiae* memperkaya debat hukum dan meningkatkan integritas serta keadilan proses hukum.

B. Pemilihan Presiden

Pemilihan Presiden adalah proses demokratis di mana rakyat sebuah negara memilih pemimpin mereka untuk memegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Di Indonesia, pemilihan presiden diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Proses pemilihan presiden melibatkan serangkaian tahapan, termasuk pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pemilihan Presiden 2024 menjadi sorotan utama, tidak hanya karena tingginya antusiasme politik, tetapi juga karena munculnya berbagai kontroversi terkait keabsahan dan keadilan proses pemilihan tersebut. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menjadi mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan presiden jika terjadi ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap prosesnya.

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian mengenai peran amicus curiae dalam sidang PHPU Pilpres 2024 dengan pendekatan yang mendalam dan kontekstual. Penelitian ini melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan observasi terhadap proses sidang PHPU yang melibatkan amicus curiae. Analisis dokumen digunakan untuk menggali data primer seperti putusan sidang, argumen hukum dari pihak yang terlibat, dan peraturan hukum yang menjadi dasar proses persidangan. Selain itu, wawancara dengan anggota tim amicus curiae, pengacara, serta pakar hukum konstitusi dilakukan untuk memahami pandangan, strategi, dan pengalaman mereka dalam memberikan kontribusi terhadap proses hukum. Observasi langsung terhadap sidang PHPU juga dilakukan untuk memahami dinamika dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat serta atmosfer keseluruhan dalam ruang sidang. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran amicus curiae dalam konteks sidang PHPU Pilpres 2024 serta implikasinya terhadap keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Amicus Curiae dalam PHPU Pilpres 2024

Amicus curiae, sebagai penyampai pandangan independen di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keputusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK) dan kepercayaan publik terhadap keadilan proses hukum. Dalam sidang yang penuh kontroversi dan kepentingan politik, amicus curiae membawa pandangan yang netral dan berlandaskan pada aspek-aspek hukum, menyediakan informasi dan analisis yang mendalam kepada MK.

Pertama, amicus curiae membantu mengidentifikasi isu-isu hukum yang kompleks dan menyoroti implikasi konstitusional dari perselisihan yang dipertimbangkan oleh MK. Dengan menyajikan pandangan independen yang tidak terikat pada kepentingan politik atau pihak yang terlibat langsung, amicus curiae membantu MK dalam memahami sudut pandang yang lebih luas dan mendalam terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Kedua, kontribusi *amicus curiae* dalam membawa perspektif yang berbeda-beda dari berbagai latar belakang keahlian hukum juga memperkaya diskusi di ruang sidang. Dengan melibatkan pakar-pakar hukum konstitusi, akademisi, dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman luas, *amicus curiae* membantu MK untuk melihat isu-isu hukum dari berbagai sudut pandang dan mengukur implikasi keputusan mereka secara holistik.

Ketiga, pandangan independen *amicus curiae* juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum di mata publik. Dalam konteks yang terkadang dipenuhi dengan narasi politik dan retorika, kehadiran *amicus curiae* memberikan keyakinan bahwa keputusan MK didasarkan pada pertimbangan hukum yang obyektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal.

Keempat, kontribusi *amicus curiae* dalam memperkaya perspektif hukum di sidang PHPU Pilpres 2024 membantu memperkuat legitimasi keputusan MK di mata publik. Dengan memastikan bahwa seluruh argumen dan sudut pandang yang relevan telah dipertimbangkan dengan baik, MK dapat menegaskan otoritasnya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokrasi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan proses hukum.

B. Tantangan Tim Amicus Curiae dalam Sidang PHPU Pilpres 2024

Tim *amicus curiae* menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dalam menjaga netralitas hukum dan independensi mereka di tengah dinamika politik yang mempengaruhi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Pertama-tama, mereka dihadapkan pada tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam hasil sidang. Para pelaku politik dan pendukung kandidat cenderung mempengaruhi opini publik dan mencoba memanipulasi proses hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Tantangan ini menguji integritas tim *amicus curiae* untuk tetap fokus pada aspek-aspek hukum dan menghindari intervensi politik yang berpotensi merusak netralitas mereka.

Selain itu, dalam lingkungan media sosial yang semakin intensif, tim *amicus curiae* juga menghadapi tantangan dalam menjaga reputasi dan integritas mereka. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau disinformasi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap mereka, mengancam kepercayaan pada netralitas dan independensi mereka sebagai penasihat hukum dalam sidang PHPU. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa pandangan hukum mereka dipahami dengan benar oleh publik.

Tantangan lainnya adalah kompleksitas kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh tim *amicus curiae*. Isu-isu konstitusional dan hukum yang muncul dalam perselisihan hasil pemilihan umum seringkali rumit dan memerlukan pemahaman mendalam serta analisis yang cermat. Dalam konteks sidang PHPU Pilpres 2024, di mana terdapat berbagai argumen yang dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat, tim *amicus curiae* harus mampu mengatasi kompleksitas tersebut dan menyajikan pandangan hukum yang tepat dan relevan kepada Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk persiapan sidang. Sidang PHPU sering kali memiliki jadwal yang ketat, sehingga tim amicus curiae harus bekerja dengan efisien untuk mengumpulkan bukti, menganalisis kasus, dan menyusun argumen hukum mereka. Keterbatasan sumber daya finansial juga dapat menjadi hambatan dalam menyediakan bantuan hukum yang optimal.

Terakhir, dalam konteks politis yang sensitif seperti sidang PHPU Pilpres 2024, tim amicus curiae juga harus menjaga keamanan dan integritas anggota tim mereka. Ancaman atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan pandangan hukum yang disampaikan dapat menjadi risiko yang serius bagi keselamatan dan kesejahteraan tim amicus curiae. Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan dari lembaga-lembaga yang berwenang menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, peran amicus curiae membuktikan pentingnya dalam mendukung keadilan dan integritas proses hukum. Melalui pandangan independen mereka, amicus curiae membantu Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memahami isu-isu hukum yang kompleks dan menyediakan analisis yang mendalam terhadap implikasi keputusan mereka. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti tekanan politik, lingkungan media sosial yang berisiko, kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya, dan keamanan tim, amicus curiae tetap konsisten dalam menjaga netralitas hukum dan independensinya. Kontribusi mereka membantu memperkuat legitimasi keputusan MK di mata publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap keadilan proses hukum.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas peran amicus curiae dalam sidang PHPU di masa mendatang, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman publik tentang peran dan fungsi amicus curiae dalam proses hukum. Edukasi tentang pentingnya pandangan independen dalam memastikan keadilan proses hukum dapat membantu mengurangi tekanan politik dan meningkatkan dukungan publik terhadap peran amicus curiae.

Kedua, diperlukan upaya untuk memperkuat perlindungan dan keamanan bagi anggota tim amicus curiae. Perlindungan yang memadai terhadap ancaman atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan pandangan hukum yang disampaikan adalah penting untuk menjaga integritas dan independensi amicus curiae.

Ketiga, pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung keterlibatan amicus curiae dalam sidang PHPU. Dukungan finansial dan logistik dapat membantu amicus curiae untuk menyediakan bantuan hukum yang optimal dan mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan peran *amicus curiae* dalam sidang PHPU di masa mendatang dapat semakin efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadilan proses hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam dampak dan efektivitas peran *amicus curiae* dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak hanya dalam konteks Pilpres 2024, tetapi juga dalam pemilihan umum lainnya di masa depan. Penelitian tersebut dapat melibatkan analisis komprehensif terhadap keputusan-keputusan MK yang melibatkan *amicus curiae*, termasuk evaluasi terhadap sejauh mana pandangan independen mereka memengaruhi hasil sidang dan persepsi publik terhadap keadilan proses hukum. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi praktik terbaik dalam melibatkan *amicus curiae*, termasuk pengembangan pedoman dan regulasi yang mengatur peran mereka serta strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa pandangan hukum mereka dapat dipahami dengan baik oleh publik. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran *amicus curiae* dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap proses hukum demokratis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, F., & Muksin, M. R. S. (2020). The Position of *Amicus Curiae* under the Indonesian Law of Evidence. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), 217-227.
- Darmawan, S. P., Ismantara, S., Natanael, N., & Rahaditya, R. (2024). PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DEMI MEMPERKUAT LEGITIMASI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 5012-5020.
- de Derechos Humanos, C. I. (2020). *Amicus curiae*. Sobre el Control de convencionalidad Supranacional y la Responsabilidad Internacional del conjunto de estados involucrados en procesos de integración Económica y los organismos derivados de estos.
- Franze, A., & Anderson, R. (2020). *Amicus curiae* at the Supreme Court: Last term and the decade in review. *The National Law Journal*, 18(11).
- Rosdiana, A. C., & Suryaningtyas, A. A. (2024). Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024. *Jurnal Audiens*, 5(1), 77-90.

Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 27-41.